Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP)

KECAMATAN JABON

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjat puji syukur kehadirat Allah Swt. kami dapat membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022, LKjIP ini dibuat dalam rangka Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 , tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap penyelenggaraan pemerintahan wajib melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Penyusunan LKjIP Tahun 2022 yang merupakan suatu proses laporan pencapaian kinerja selama 1 Tahun Anggaran dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan dan peluang yang ada berdasarkan RENSTRA (Rencana dan Strategi) Tahun 2016 - 2021 yang telah ditetapkan sebagai acuan keberhasilan tingkat pencapaian suatu Program kegiatan dan kebijakan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimana Camat mempertanggungjawabkan dalam pencapaian Visi dan Misi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang direncanakan dan ditetapkan.

Demikian LKjIP Kecamatan Jabon dibuat semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Jabon, Januari 2023

CAMAT JABON

PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN JABON SIDOARJO

DEDIK IRWANTO, S.Sos

Pembina

NIP. 19691003 198910 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iii**
DAFTAR GRAFIK ..... **iv**
DAFTAR BAGAN ..... **v**
IKHTISAR EKSEKUTIF ..... **vi**
PERNYATAAN TELAH DI REVIU ..... **ix**
BAB I **1**
PENDAHULUAN **1**
2.1. Kedudukan 1
2.2. Aspek Strategis OPD 8
BAB II **13**
PERENCANAAN KINERJA **13**
2.1. Aspek Strategis OPD 13
2.2. Tujuan dan Sasaran 13
2.3. Perjanjian Kinerja 2022 14
2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2022 15
BAB III **19**
AKUNTABILITAS KINERJA **19**
3.1 Pengukuran Kinerja 19
3.2 Analisis Capaian Kinerja 20
3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran 31
3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 35
BAB IV **37**
PENUTUP **37**
4.1 Kesimpulan 37
4.2 Rencana Tindak Lanjut 38

LAMPIRAN
1. Perjanjian Kinerja Kepala PD & Pejabat Struktural Tahun 2022
2. IKU Tahun 2022
3. Rencana Aksi Tahun 2022
4. Pohon Kinerja (SKP)

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capian Kinerja Kecamatan Jabon Tahun vi
Tabel 2 Kategori Capaian Tujuan vii
Tabel 3 Kategori Capian Sasaran viii
Tabel 4 Data ASN Kecamatan Jabon 7
Tabel 5 Jumlah Pegawai OPD 8
Tabel 6 Jumlah Pegawai berdasarkan Proporsi Jabatan 8
Tabel 7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 8
Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2022 14
Tabel 9 Rincian anggaran pada tahun 2022 16
Tabel 10 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja 19
Tabel 11 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja 19
Tabel 12 Realisasi kinerja sasaran pertama Tahun 2022 20
Tabel 13 Perkembangan kinerja sasaran pertama Tahun 2022 21
Tabel 14 Perkembangan kinerja sasaran pertama Tahun 2022 22
Tabel 15 Perbandingan kinerja sasaran pertama dengan Instansi sejenis 22
Tabel 16 Realisasi kinerja program dan kegiatan Sasaran 1 23
Tabel 17 Realisasi kinerja sasaran kedua Tahun 2022 24
Tabel 18 Perkembangan kinerja sasaran kedua Tahun 2021-2022 26
Tabel 19 Perkembangan kinerja sasaran pertama terhadap target akhir Renstra 27
Tabel 20 Perbandingan kinerja sasaran kedua dengan Instansi sejenis 28
Tabel 21 Realisasi kinerja program dan kegiatan sasaran kedua 29
Tabel 22 Realisasi kinerja dan keuangan Tahun 2022 31
Tabel 23 Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022 35

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Realisasi kinerja sasaran pertama Tahun 2022 20
Grafik 2 Perkembangan kinerja sasaran pertama Tahun 2022 21
Grafik 3 Perkembangan kinerja sasaran pertama Tahun 2022 22
Grafik 4 Perbandingan kinerja sasaran pertama dengan instansi sejenis Tahun 2022 22
Grafik 5 Realisasi Kinerja Sasaran 2 24
Grafik 6 Perkembangan kinerja sasaran kedua Tahun 2021-2022 27
Grafik 7 Perkembangan kinerja sasaran pertama terhadap target akhir Renstra 27
Grafik 8 Perbandingan kinerja sasaran 2 dengan instansi sejenis 28

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Kecamatan Jabon 2

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan fungsi dan urusan yang menjadi kewenangannya, senantiasa berusaha untuk meningkatkan kinerjanya secara profesional dan proporsional.Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kinerjanya tersebut adalah dengan disusunnya RPJMD tahun 2016 – 2021 sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2006. Berdasarkan RPJMD yang telah tersusun tersebut diharapkan telah tergambar rencana kinerja yang ingin dicapai dalam jangka menengah.

Penyelenggaraan Pemerintah di tahun 2022 adalah bagian dari penggalan perjalanan RPJMD. Berdasarkan sasaran di dalam RPJMD yang ingin dicapai pada tahun 2022, disusun Rencana Kerja SKPD (Renja). Untuk operasionalisasi rencana kerja, maka disusun Rencana Kerja dan Anggaran yang tertuang dalam APBD tahun 2022, yang selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan Penetapan Kinerja Tahun 2022.

Laporan Kinerja Kecamatan Jabon merupakan pertanggungjawaban akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan sebagai perwujudan *Good Governance* dan kebijakan yang transparan. Selain itu Laporan Kinerja ini merupakan wujud dari kinerja dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana yang dijabarkandalam tujuan / sasaran strategis yang mengacu pada RPJMD 2016-2021.

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, Kecamatan Jabon menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai pada tahun 2016-2021, yaitu **Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan dan Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan** Untuk menunjang pencapaian tujuan tersebut disusunlah Peta Strategis yang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis, yaitu (1) Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dan (2) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan. Berdasarkan tujuan dan sasaran diatas, berikut hasil capaian kinerja Kecamatan Jabon Tahun 2022 :

Tabel 1 Capian Kinerja Kecamatan Jabon Tahun

I. SASARAN UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	139,86%

II. SASARAN TAMBAHAN

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	% Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	104,27%
		Nilai SAKIP	101,82%
		Nilai RB	83,76%
		Nilai IPP	78,67%
		Serapan Anggaran	93,38%

KETERANGAN :

NO	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan pada akhir tahun anggaran, yaitu dengan cara membandingkan antara target sasaran dan realisasinya. Dari hasil analisis dan evaluasi secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Jabon dapat melaksanakan seluruh target yang dibebankan, meskipun masih ada beberapa indikator yang perlu ditingkatkan realisasi capaiannya.

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Capaian indikator kinerja tujuan, sebanyak 1 Tujuan dengan 1 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Sangat Berhasil

Tabel 2 Kategori Capaian Tujuan

- Capaian indikator kinerja sasaran, sebanyak 2 sasaran dengan 6 indikator, dengan ringkasan capaian sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori
1	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	Sangat Berhasil
2	Nilai SKM Kecamatan	Sangat Berhasil
	Nilai SAKIP Kecamatan	Sangat Berhasil

	Nilai RB	Cukup
	Nilai IPP	Cukup
	Persentase Penyerapan Anggaran	Berhasil

Tabel 3 Kategori Capian Sasaran

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
KECAMATAN JABON TAHUN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab dari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal–hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jabon, Januari 2023
CAMAT JABON

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN JABON

DEDIK IRWANTO, S.Sos
Pembina
NIP. 19691003 198910 1 001

BAB I
PENDAHULUAN

2.1. Kedudukan

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut maka Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kewilayahan.

Susunan organisasi Kecamatan Jabon mengacu pada Peraturan Bupati Nomor : 91 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan di kabupaten sidoarjo, terdiri dari :

a. Camat
b. Sekretaris Camat
   Membawahi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Kepala Seksi Pemerintahan
d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Kepala Seksi Perekonomian
f. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
g. Kepala Seksi Pembangunan

Berikut bagan struktur organisasi Kecamatan Jabon :

Bagan 1 Struktur Organisasi Kecamatan Jabon

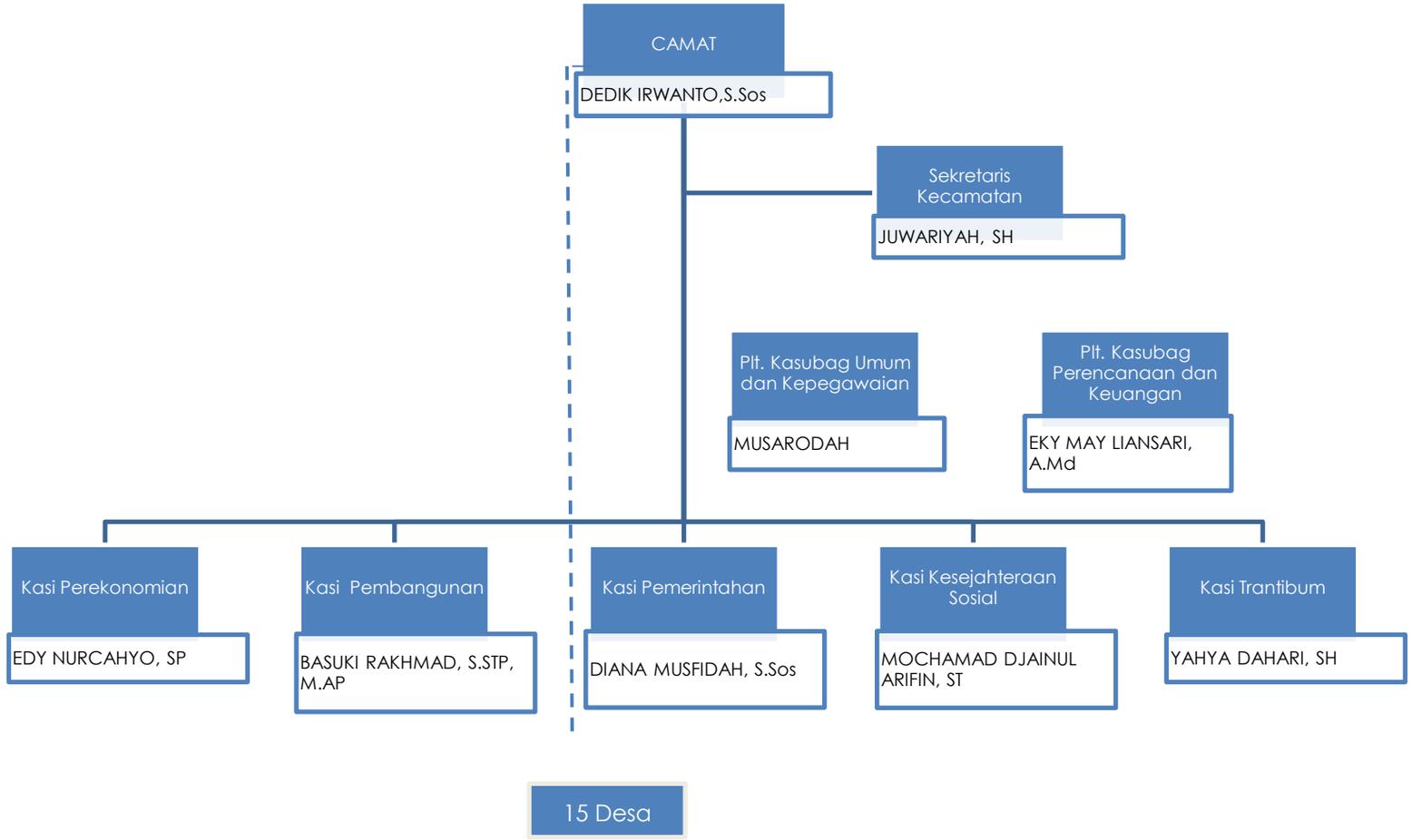

Adapun dalam Pembagian Tugas dan Fungsi dalam Peraturan Bupati tersebut di atas, yaitu:

1. CAMAT

Tugas dan fungsi organisasi pada prinsipnya dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam menjalankan roda organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sehingga senantiasa dibutuhkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi antar seksi pada Kantor Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Berikut adalah tugas Camat, meliputi :

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
- Menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
- Melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
- Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat berwenang menandatangani :

a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
b) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);

c) Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;

d) Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);

e) Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;

f) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;

g) IzinGangguan (HO) Usaha Mikro;

h) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

2. SEKRETARIS CAMAT

1) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan , mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Camat dalam hal:

- Penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi;
- Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
- Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuanganmempunyaitugas :

- Menyiapkan penyusunan perencanaan program;
- Mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
- Menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- Melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- Melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
- Menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
- Menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
- Melaksanakan administrasi kepegawaian;

- Melaksanakan pembinaan kepegawaian;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. SEKSI PEMERINTAHAN

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
- Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
  a) Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
  b) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;
  c) Pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan teknis kegiatan ketentraman dan ketertiban umum, antara lain:
  a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
  b) Penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
  c) Pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/ reklame liar);
  d) Penanganan konflik sosial;
- Memproses permohonan Izin Ganguan usaha mikro;
- Melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

5. SEKSI PEREKONOMIAN

   Dalam melaksanakan tugas, Seksi Perekonomian mempunyai fungsi :

   - Penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
   - Pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
     a) Pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
     b) Pembinaan Pedagang Kaki Lima.
   - Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
     a) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
     b) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
   - Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
   - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
   - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

6. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

   Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

   - Penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
   - Pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
     a) Pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
     b) Pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
   - Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
   - Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
   - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. SEKSI PEMBAANGUNAN FISIK

   Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
- Pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
  a) Pembinaan penanganan sampah domestik;
  b) Pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
- Pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
  a) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
  b) Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m² (empat ratus meter persegi).
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
- Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

8. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

   Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan sebagian tugas dari fungsi camat sesuai keahlian dan kebutuhan.

9. DESA

   Dalam pelaksanaan pemerintahan di Kecamatan Jabon, didukung oleh aparatur pemerintah desa yang terbagi atas 15 desa.

Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 20 Orang. Adapun rincian ASN pada Kecamatan Jabon adalah sebagai berikut:

Tabel 4 Data ASN Kecamatan Jabon

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala (Camat)	1 Orang
2	Administrator (Sekretaris Camat)	1 Orang
3	Pengawas (Kasi Pemerintahan)	1 Orang
4	Pengawas (Kasi Kesejahteraan Sosial)	1 Orang
5	Pengawas (Kasi Perekonomian)	1 Orang
6	Pengawas (Kasi Pembangunan)	1 Orang

7	Pengawas (Kasi Ketenraman dan Ketertiban Umum)	1 Orang
8	Pengawas (Kasubag Perencanaan dan Keuangan)	0 Orang
9	Pengawas (Kasubag Umum dan Kepegawaian)	0 Orang
10	Pelaksana	13 Orang

2.2. Aspek Strategis OPD

a. Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya OPD adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi dan sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya serta asset dan potensi yang berfungsi sebagai modal dalam organisasi yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata fisik dan non fisik dalam merealisasikan tujuam organisasi.

Tabel 5 Jumlah Pegawai OPD

No	Posisi	Jumlah
1	PNS	18
2	CPNS	2
3	Non PNS / Tenaga Kontrak	20

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Jabon Tahun 2022

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tahun 2022 berdasarkan jumlah pegawai PNS yaitu 18 pegawai, CPNS berjumlah 2 pegawai dan Non PNS berjumlah 15 pegawai.

Tabel 6 Jumlah Pegawai berdasarkan Proporsi Jabatan

No	Pegawai	Jumlah
1	Eselon III a	1
2	Eselon III b	1
3	Eselon IV a	5
4	Eselon IV b	-

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Jabon Tahun 2021

Berdasarkan table 1.2.2, pegawai Kecamatan Jabon terdiri dari 1 Eselon III a, 1 Eselon III b, 2 Eselon IV a, dan 1 Eselon IV b.

Tabel 7 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SMP	1
2	SMA/SMK	5
3	D III/ D IV	6
4	S1	6

5	S2	2
	Total	20

Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Jabon Tahun 2022

Pada tabel diatas, jumlah pegawai lulusan SMP sebanyak 1 orang, lulusan SMA/SMK sebanyak 5 orang, lulusan D III/ D IV sebanyak 6 orang dan lulusan Strata 1 sebanyak 6 orang serta lulusan strata 2 sebanyak 2 orang. Berdasarkan pada total jumlah pegawai sebanyak 20 orang lebih banyak didominasi oleh lulusan DIII dan strata 1.

Dari penyajian tabel diatas tentang Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Perangkat Daerah Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo dirasa cukup mampu untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam melayani kebutuhan masyarakat yang ada di Kecamatan Jabon.

b. Aset Yang Dimiliki

Sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan masyarakat perlu lebih ditingkatkan baik secara kualitas maupun kuantitas, seiring peningkatan kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jabon telah tersedia sarana dan prasarana meliputi :

Sarana :

- Kendaraan roda empat : 4 Unit
- Kendaraan roda dua : 14 Unit
- Kendaraan Roda tiga : 1 Unit
- Komputer : 14 Unit
- Mesin Ketik : 3 Unit
- Laptop : 12 Unit
- Handphone : 2 Unit

Prasarana :

- Gedung Kantor : 1 Unit

c. Isu Strategis Yang Dihadapi

Penentuan isu-isu strategis pembangunan wilayah Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo tahun 2016-2021 didasarkan pada hasil telaah mengenai kondisi dan potensi wilayah kecamatan, identifikasi permasalahan pembangunan dan permasalahan pelayanan Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Penentuan isu-isu strategis di Kecamatan Kabupaten Sidoarjo disusun untuk pembenahan dan dipertahankan. Berdasarkan telaah analisis permasalahan, isu strategis Kecamatan Jabon di Kabupaten Sidoarja adalah:

a. Kekuatan
   1) Struktur Organisasi dan Tupoksi organisasi yang jelas,
   2) Motivasi Bekerja Pegawai yang Kuat,
   3) Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang cenderung meningkat setiap tahunnya,
   4) Peningkatan anggaran setiap tahunnya dalam menunjang kinerja aparatur dan pelayanan publik,
   5) Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN),
   6) Sudah Adanya Standar Pelayanan Publik dan Standart Operasional Prosedur Pelayanan,
b. Kelemahan
   1) Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Aparatur
   2) Masih kurang optimalnya koordinasi antar bidang, antar OPD dan pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan
   3) Masih kurangnya jumlah sumber daya Aparatur kecamatan dalam monitoring dan pendampingan Desa
   4) Belum optimalnya kualitas kinerja sumber daya aparatur
c. Peluang
   1) DukungandariSekretaris Daerah Bagian Administrasi Pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan adminstrasi terpadu kecamatan (Paten) melalui pendampingan, Monitoring dan evaluasi
   2) Perkembangan Teknologi dan informasi dalam peningkatan kualitas pelayanan
   3) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait prosedur pelayanan
   4) Partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan dan kritik terkait kualitas pelayanan melalui kotak saran dan pengisian Survei Kepuasan Masyarakat
d. Ancaman/Tantangan
   1) Tuntutan Pemahaman aparatur Kecamatan terkait perencanaan dan pelaporan serta system akuntabilitas kinerja yang baik
   2) Pemahaman Aparatur Desa Terkait Perencanaan dan Pelaporan Pembangunana Daerah yang masih kurang
   3) Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan/musrenbang desa yang masih kurang
   4) Tuntutan Pemanfaatan dan Pengembangan potensi Lokal Daerah

5) Tuntutan penyesuaian wilayah kecamatan sesuai pembagian kawasan wilayah di RTRW yaitu masuk dalam SSWP III dan SSWP V
6) Sedikitnya desa yang telah melakukan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas
7) Perubahan Tata ruang pemukiman dan pertanian akibat Lumpur Lapindo
8) Produktifitas Pertanian yang menurun

Berdasarkan isu-isu strategis diatas maka dapat disimpulkan secara keseluruhan isu strategis yang ada pada Kecamatan Jabon dapat disimpulkan sebagai berikut:

a) Belum Optimalnya Sarana Prasarana dan Infrastruktur Penunjang Kinerja Aparatur

Masih perlunya peningkatan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur seperti administrasi perkantoran, perawatan dan pengembangan gedung kecamatan dan ruang pelayanan, pencukupan sarana dan prasarana pelayanan.

b) Kurangnya Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur

Masih Perlunya Peningkatan kinerja pegawai dalam menunjang peningkatan kualitas pelayanan, meningkatkan capaian kinerja OPD, dan profesionalisme pegawai. Selain itu dari segi jumlah pegawai juga terdapat kekurangan terutama pegawai pada ruang pelayanan dan pendampingan desa sehingga pelayanan dan pendampingan desa yang dilakukan masih belum optimal.

c) Belum Optimalnya Pelayanan Kecamatan kepada Masyarakat

Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan melalui pencukupan sarana dan prasarana penunjang peningkatan kualitas pelayanan, masih belum rutinnya pelaksanaan pengukuran Kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan setiap 1 (satu) semester, dan belum optimalnya sosialisasi terkait prosedur pelayanan sehingga masih ada masyarakat yang belum mengerti terkait prosedur pelayanan di Kecamatan.

d) Belum Optimalnya Pelaksanaan koordinasi Antar Pihak atau OPD Terkait

Masih belum optimalnya aparatur kecamatan dalam pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan yang berada di kecamatan terutama terkait penjadwalan yang pelaksanaannya tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

e) Belum Optimalnya Pemahaman Seluruh Aparatur Kecamatan Terkait Perencanaan dan Pelaporan

Perlunya pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur dalam pembuatan dokumen perencanaan dan pelaporan serta pemahaman terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) dimana tanggungjawab SAKIP tidak hanya bertumpu pada bagian perencanaan dan pelaporan saja tetapi seluruh Bidang/seksi di lingkup kecamatan.

f) **Belum Optimalnya Pemanfaatan dan Pengembangan Potensi Daerah**

Dalam Menghadapi tuntutan ekonomi global dan pasar bebas maka perlunya pemanfaatan dan pengembangan potensi local dari segi sumberdaya manusia maupun sumber daya alam yang ada agar mampu bersaing dan meningkatkan ekonomi daerah. Kecamatan Jabon yang masuk pada kawasan SSWP III meliputi wilayah dengan fungsi utama Kawasan permukiman, Konservasi Geologi, industri, pertanian, dan perdagangan skala regional dan SSWP V meliputi wilayah pesisir dengan fungsi utama kawasan budidaya perikanan dan pariwisata masih belum optimalnya pemanfaatan kawasan tersebut guna meningkatkan ekonomi daerah.

g) **Masih Kurangnya Pemahaman Aparatur Desa Terkait Perencanaan dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Kinerja, dan Keuangan**

Masih banyaknya aparatur desa yang belum memahami terkait perencanaan dan pelaporan Pembangunan, Kinerja dan Anggaran sehingga desa masih banyak yang belum melaksanakan perencanaan dan pelaporan yang berkualitas. Pada segi masyarakat desa juga masih kurangnya partisipasi dari masyarakat dalam musrenbang desa.

h) **DampakBencana Lumpur Lapindo**

Adanya perubahan tata ruang terkait kawasan pemukiman dan sawah yang terkena dampak lumpur lapindo, adanya penurunan produktifitas pertanian masyarakat dan Pencemaran lingkungan kawasan sekitar lumpur lapindo.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Aspek Strategis OPD

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi "**Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan**". Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo adalah menunjang misi 1 "**Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"** dan misi 5 "**Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga".**

2.2. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran / implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan yang akan kami dukung adalah Tujuan 1 "Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha dan Tujuan 6 "Menguatnya Karakter Masyarakat melalui Internalisasi Nilai-Nilai Keagamaan dan kebudayaan untuk Menciptakan Ketertiban, Kerukunan dan Ketentraman dalam masyarakat" dengan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai Sasaran 1 "Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Berbasis Digital", Sasaran 2 "Terselenggaranya Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha", Sasaran 12 "Berkembangnya nilai-nilai budaya dan agama serta toleransi dalam Masyarakat", dan Sasaran 13 "Terciptanya kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tentram" yang dituju. Sehingga Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo menetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

a) Tujuan

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum.

Indikator : Nilai SKM Kecamatan.

b) Sasaran

1. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

   Indikator : Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi

2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

   Indikator : Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Nilai SAKIP, Nilai RB dan Nilai IPP

2.3. Perjanjian Kinerja 2022

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya dengan penguatan pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Jabon. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2022 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 8 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	71,5%

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Sangat Baik (90,5)
		Nilai SAKIP Kecamatan	BB (77,5)
		Nilai RB	27,22
		Nilai IPP	A- (4,05)
		Persentase Penyerapan Anggaran	90%

Pada Indikator kinerja Utama sebagai mana tertuang dalam Renstra, pada indikator Prosentase permasalahan trantibum yang difasilitasi dengan target 71,5%, dengan pertimbangan bahwa indikator tersebut merupakan indikator baru pada tahun 2022 sehingga capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pada indikator Presentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Jabon dengan target 90,5, dengan pertimbangan capaian tahun lalu 97,19 dan target di Renstra tahun 2022 sebesar

90,5 sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 90,5. Akan tetapi, pertimbangan lain mengenai target tahun 2022 yang lebih rendah dibandingkan dengan capian tahun lalu adalah karena target tahun lalu sebesar 85,85.

Pada indikator Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Kecamatan Jabon dengan target BB (77,5), dengan pertimbangan capaian tahun lalu ialah BB dengan nilai 77,35 dan target di Renstra tahun 2022 BB (77,5) sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 77,35.

Pada indikator Persentase Nilai Reformasi Birokrasi (RB) dengan target 27,22. Indicator tersebut merupakan indicator tambahan yang baru tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sehingga capaian tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Akan tetapi, target di Renstra tahun 2022 sebesar 27,22 sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 27,22.

Pada indikator Persentase Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) dengan target A- (4,05). Indicator tersebut merupakan indicator tambahan baru yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Akan tetapi pertimbangan lain ialah pada tahun sebelumnya telah dilaksanakan penilaian IPP Kecamatan Jabon dengan capaian A- (4,05) sehingga target di Renstra tahun 2022 adalah A- (4,05).

Pada indikator Persentase Serapan Anggaran dengan target 90%, dengan pertimbangan capaian tahun lalu 89,92%. Akan tetapi, indicator tersebut merupakan indicator tambahan baru yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan target di Renstra tahun 2022 90%, sehingga target kinerja tahun 2022 adalah 90%.

2.4. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 6.089.971.285,00. Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan refocusing. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 5.180.074.970,00 dengan rincian sebagai mana tabel 2.2.

Tabel 9 Rincian anggaran pada tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Program	Kegiatan	Anggaran	Anggaran Perubahan
1	**Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum**	**Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	35.110.000	35.110.000
				Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	1.080.000	1.080.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	48.394.224	48.394.224

2		**Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.636.400	1.636.400
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.009.666.797	2.552.710.532
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	355.021.314	346.861.314
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.893.600	56.977.500
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.126.418.400	1.051.836.800
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.500.000	307.500.000
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	503.853.550	503.853.550
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	21.982.500	21.982.500

				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	617.838.400	241.556.050
5			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.576.100	10.576.100
			Total Anggaran		**6.089.971.285**	**5.180.074.970**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja yang telah dicapai. Dalam hal ini pembandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Terhadap terjadinya celah kinerja, dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3.1 Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 10 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 ≤ 90	Baik
3	70,01 ≤ 80	Cukup
4	0 ≤ 70,01	Kurang

Hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	a. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	139,6%	Sangat Berhasil
		b. Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	92,38%	Berhasil

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2022. Berikut analisis capaian kinerja pada Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 :

1. **Sasaran pertama Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum**

   Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran pertama.

Tabel 12 Realisasi kinerja sasaran pertama Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	71,5	100	139,86%

Grafik 1 Realisasi kinerja sasaran pertama Tahun 2022

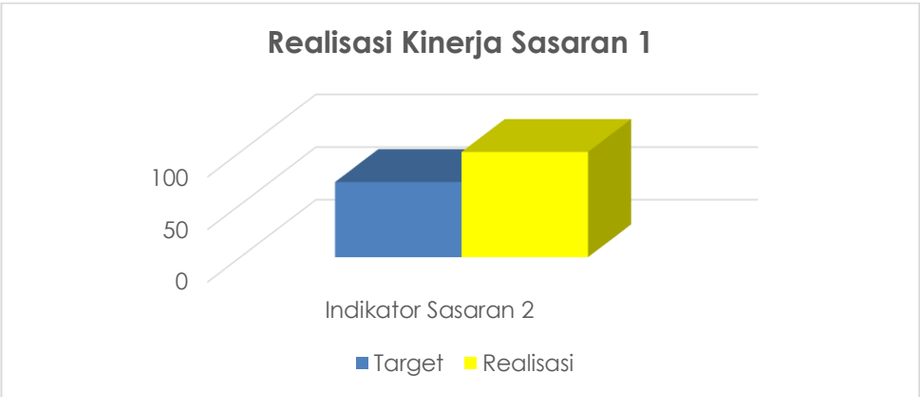

Dalam pencapaian sasaran pertama diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 1 indikator. Target Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi di Kecamatan Jabon pada tahun 2022 adalah 71,5 dengan realisasi 100 atau tercapai sebesar 139,86% dari target.

Untuk mencapai target kinerja di atas, pada Tahun 2022 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi dengan instansi vertical terkait (seperti forkopimka) dan para seksi

2. Selalu berusaha dengan sigap dan tanggap terhadap pengaduan yang ada

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal. Namun atas realisasi kinerja sasaran kedua jjuga tidak lepas dari adanya kendala dan hambatan yaitu masih banyaknya masyarakat yang melanggar dan mengabaikan perbup serta perkada.

Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada sasaran kedua indikator tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun pertama penerapan kinerja berdasarkan Renstra Kecamatan Jabon periode 2021-2026 yang sasaran dan indikator kinerjanya mengalami perubahan mengikuti visi misi Kepala Daerah Terpilih. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022 :

Tabel 13 Perkembangan kinerja sasaran pertama Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	
			2021	2022
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.1 Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Jabon dilaksanakan dengan baik	72,5	NA
		1.2 Persentase desa maju di Kecamatan Jabon	20	NA
2	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	2.1 Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	NA	100

Grafik 2 Perkembangan kinerja sasaran pertama Tahun 2022

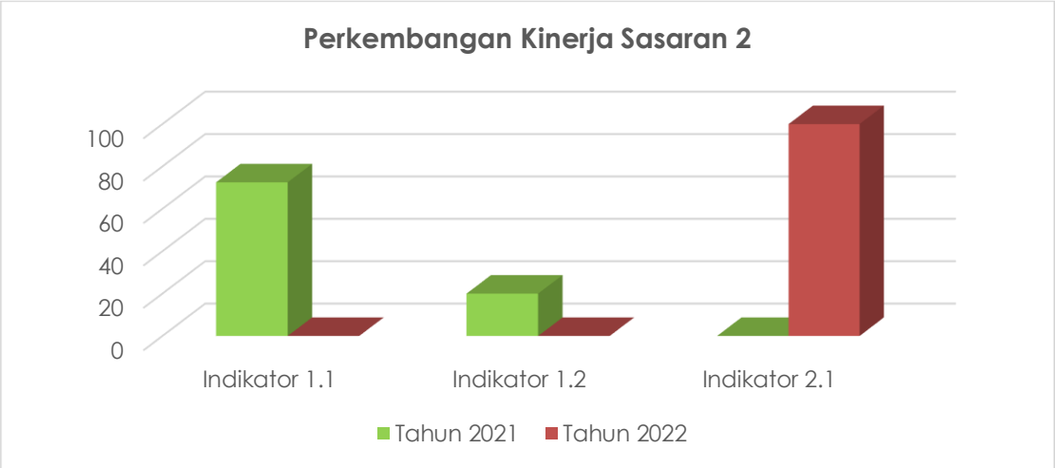

Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik

terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra :

Tabel 14 Perkembangan kinerja sasaran pertama Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)	REALISASI TAHUN 2022	% CAPAIAN
1	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100	100	100

Grafik 3 Perkembangan kinerja sasaran pertama Tahun 2022

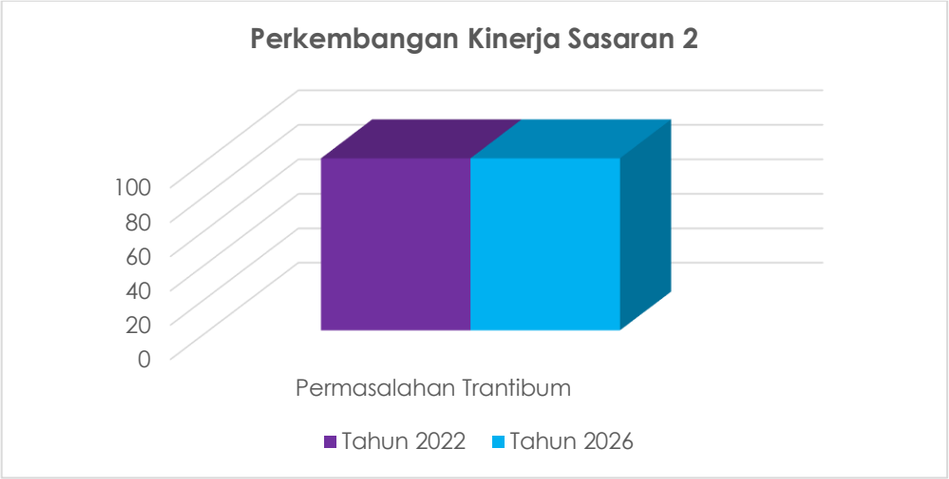

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sasaran kedua dari Kecamatan Tanggulangin selaku instansi sejenis :

Tabel 15 Perbandingan kinerja sasaran pertama dengan Instansi sejenis

No.	Indikator Kinerja	Kecamatan Jabon	Kecamatan Tanggulangin	% Capaian
1	Prosentase Permasalahan trantibum yang difasilitasi	100	100	100%

Grafik 4 Perbandingan kinerja sasaran pertama dengan instansi sejenis Tahun 2022

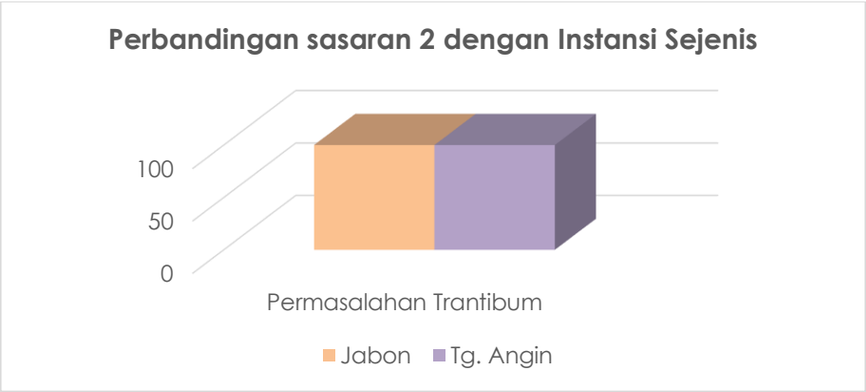

Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama adalah sebesar Rp. 84.584.224,00 dengan realisasi sebesar Rp. 58.915.000,00. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama :

Tabel 16 Realisasi kinerja program dan kegiatan Sasaran 1

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100	100	36.190.000	28.225.000
1	Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial, agama, dan kemasyarakata n yang tersusun	6	6	35.110.000	27.145.000
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran perda, dan perkada yang difasilitasi	3	1	1.080.000	1.080.000
II	PROGRAM PENYELENGGAR AAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggara an urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	100	48.394.224	30.690.000
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	2	2	48.394.224	30.690.000
		b. Jumlah Lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Besar Nasional	1	1		

	Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K					
Total					**84.584.224**	**58.915.000**

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja :

1. Meningkatkan koordinasi dengan forkopimka dan masing-masing seksi;
2. Melakukan pemantauan wilayah (Patroli Keliling) untuk mencegah adanya pelanggaran perda dan perkada
3. Memberikan pelayanan dan fasilitasi terbaik terhadap pengaduan masyarakat.

2. Sasaran kedua meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran kedua.

Tabel 17 Realisasi kinerja sasaran kedua Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	1. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat Baik (90,5)	94,36	104,27%
		2. Nilai SAKIP	BB (77,5)	78,91	101,82%
		3. Nilai RB	27,22	22,8	83,76%
		4. Nilai IPP	A- (4,05)	3,54	78,67%
		5. Prosentase serapan anggaran	90%	84,04	93,38%

Grafik 5 Realisasi Kinerja Sasaran 2

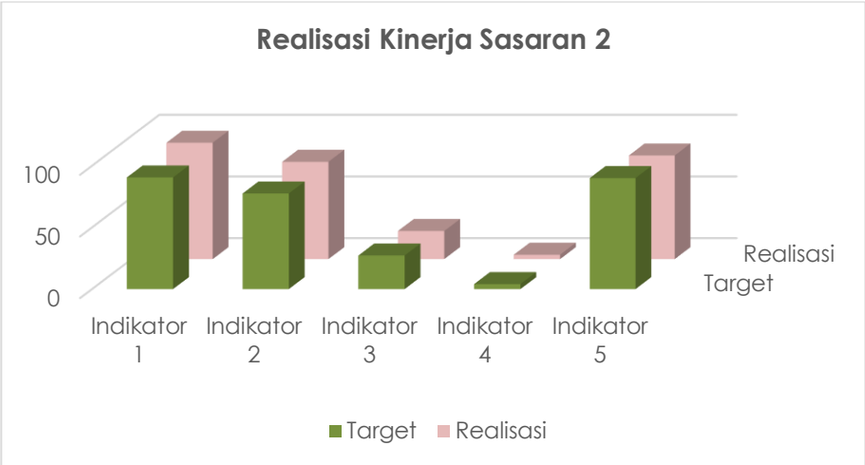

Dalam pencapaian sasaran kedua diukur tingkat keberhasilannya dengan jumlah indikator sebanyak 5 indikator. Berikut adalah penjelasan atas realisasi masing-masing indikator pada sasaran pertama, antara lain :

a. Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)

   Target Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kecamatan Jabon pada tahun 2022 adalah 90,5 dengan realisasi 94,36 atau tercapai sebesar 104,27% dari target.

b. Indikator Nilai SAKIP

   Target Nilai SAKIP di Kecamatan Jabon pada tahun 2022 adalah BB (77,5) dengan realisasi BB (78,91) atau tercapai sebesar 101,82% dari target.

c. Indikator Nilai RB

   Target Nilai RB di Kecamatan Jabon pada tahun 2022 adalah 27,77 dengan realisasi 22,8 atau tercapai sebesar 83,76% dari target.

d. Indikator Nilai IPP

   Target Nilai IPP di Kecamatan Jabon pada tahun 2022 adalah 4,05 dengan realisasi 3,54 atau tercapai sebesar 78,07% dari target.

e. Indikator Prosentase serapan anggaran

   Target prosentase serapan anggaran di Kecamatan Jabon pada tahun 2022 adalah 90% dengan realisasi 84,04% atau tercapai sebesar 93,38% dari target.

Untuk mencapai target kinerja di atas, pada Tahun 2022 Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

a) Meningkatkan koordinasi antar seksi
b) Selalu memantau kinerja para SDM kecamatan dan aparatur desa
c) Selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2022 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut dapat diatasi/tidak dapat diatasi sehingga menyebabkan realisasi kinerja terealisasi secara optimal/tidak optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran pertama adalah sebagai berikut:

a) Belum meratanya kompetensi SDM kecamatan dan aparatur desa dalam menjalankan tugas dan fungsi aparatur
b) Blanko e-KTP sedang kosong, sehingga tidak dapat melaksanakan pencetakan e-KTP

Realisasi Kinerja Tahun 2022 pada sasaran kedua indikator tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan tahun 2022 merupakan tahun pertama penerapan kinerja tambahan berdasarkan Renstra Kecamatan Jabon periode 2021-2026 yang sasaran dan indikator kinerjanya mengalami perubahan mengikuti visi misi Kepala Daerah Terpilih. Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2021-2022 :

Tabel 18 Perkembangan kinerja sasaran kedua Tahun 2021-2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	
			2021	2022
1	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	1.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97,19	NA
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	2.1 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	NA	94,36
		2.2 Nilai SAKIP	NA	78,91
		2.3 Nilai RB	NA	22,8
		2.4 Nilai IPP	NA	3,54
		2.5 Prosentase Penyerapan Anggaran	NA	84,04

Grafik 6 Perkembangan kinerja sasaran kedua Tahun 2021-2022

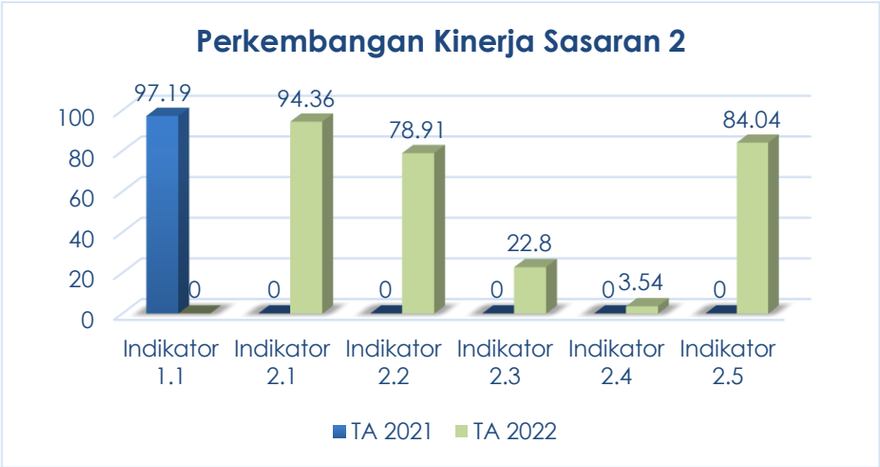

Selain itu jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian pada tahun 2022 ini telah mengalami perkembangan yang baik terhadap target jangka menengah atau akhir dari periode Renstra pada Tahun 2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2022 terhadap target target akhir Renstra.

Tabel 19 Perkembangan kinerja sasaran pertama terhadap target akhir Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Persentase Kemajuan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	94,5	94,36	99,85%
		Nilai SAKIP	83,05	78,91	95,02%
		Nilai RB	28,5	22,8	80,00%
		Nilai IPP	4,15	3,54	85,30%
		Prosentase Penyerapan Anggaran	N/A	84,04	-

Grafik 7 Perkembangan kinerja sasaran pertama terhadap target akhir Renstra

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 sasaran kedua dari Kecamatan Tanggulangin selaku instansi sejenis :

Tabel 20 Perbandingan kinerja sasaran kedua dengan Instansi sejenis

No.	Indikator Kinerja	Kecamatan Jabon	Kecamatan Tanggulangin	% Capaian
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	94,36	92,56	101,94%
	Nilai SAKIP	78,91	79,11	99,75%
	Nilai RB	22,8	25,03	91,09%
	Nilai IPP	3,54	3,16	112,03%
	Prosentase Penyerapan Anggaran	84,04%	89,46%	93,94%

Grafik 8 Perbandingan kinerja sasaran 2 dengan instansi sejenis

Berdasarkan tabel dan grafik tersebut, dapat disampaikan realisasi capaian kinerja Kecamatan Jabon apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja dari Kecamatan Tanggulangin, maka capaian kinerja :

a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan jabon lebih tinggi dari Kecamatan Jabon dengan capaian 101,94%.
b. Nilai SAKIP Kecamatan Jabon Lebih rendah dari Kecamatan Tanggulangin dengan capaian 99,75%.
c. Nilai RB Kecamatan Jabon Lebih rendah dari Kecamatan Tanggulangin dengan capaian 91,09%.
d. Nilai IPP Kecamatan Jabon lebih tinggi dari Kecamatan Tanggulangin dengan capaian 112,03%.
e. Prosentase penyerapan anggaran Kecamatan Jabon lebih rendah dari Kecamatan Tanggulangin dengan capaian 93,94%.

Capaian kinerja diatas juga harus tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran pertama adalah sebesar Rp. 5.095.490.746,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.294.636.187,00. Berikut rincian realisasi kinerja program/kegiatan dan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran pertama :

Tabel 21 Realisasi kinerja program dan kegiatan sasaran kedua

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja		Anggaran	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	82,61	94,36	4.482.480.071	3.919.897.428
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan	3	3	1.636.400	1.546.000
		b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	4	4		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90	84,04	2.552.710.532	2.323.844.920
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,5	94,36	346.861.314	277.108.050
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang diadakan	1	1	56.977.500	52.39.795
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100	100	1.051.836.800	971.276.846
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4	4	307.500.000	293.194.640
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi	100	100	767.392.100	367.224.759

	PELAYANAN PUBLIK	masyarakat, dan PKL				
		Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	95,66	109,6		
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	11	12	503.853.550	107.726.000
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	8000	8765	21.982.500	20.465.000
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	N/A	N/A	241.556.050	239.033.759
		b. Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	8	6		
		c. Jumlah Laporan kegiatan	3	3		

		pembinaan yang tersusun				
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100	100	10.576.100	7.514.000
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	15	15	10.576.100	7.514.000
Total					**5.095.490.746**	**4.294.636.187**

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi untuk mewujudkan kinerja sasaran pertama. Berikut alternatif solusi dan rekomendasi berdasarkan analisis capaian kinerja :

1. Meningkatkan koordinasi antar seksi
2. Memantau kinerja para SDM kecamatan dan aparatur desa melalui monev rutin
3. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat

3.3 Realisasi Kinerja dan Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk tahun anggaran 2022 berdasarkan realisasi kinerja dan keuangan yaitu sebagai berikut.

Tabel 22 Realisasi kinerja dan keuangan Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			T	R	%	Target	Realisasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan	82,61	94,36	114, 22%	4.482.480.071	3.919.897.428	87,45 %
1	Perencanaan, Penganggaran,	a. Jumlah tahapan	3	3	100, 00%	1.636.400	1.546.000	94,48 %

	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	perencanaan yang dilaksanakan						
		b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	4	4	100,00%			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	90	84,04	93,38%	2.552.710.532	2.323.844.920	91,03%
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90,5	94,36	104,27%	346.861.314	277.108.050	79,89%
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang diadakan	1	1	100,00%	56.977.500	52.939.795	92,91%
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100	100	100,00%	1.051.836.800	971.276.846	92,34%
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4	4	100,00%	307.500.000	293.194.640	95,35%
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	100	100	100,00%	767.392.100	367.224.759	47,85%
		Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar	95,66	109,6	114,57%			
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan	11	12	109,09%	503.853.550	107.726.000	21,38%

		kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun						
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	8000	8765	109,56%	21.982.500	20.465.000	93,10%
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	a. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan	N/A	N/A	N/A	241.556.050	239.033.759	98,96%
		b. Jumlah Laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang dilaksanakan	8	6	75,00%			
		c. Jumlah Laporan kegiatan pembinaan yang tersusun	3	3	100,00%			
III	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100	100	100,00%	36.190.000	28.225.000	77,99%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Lembaga sosial, agama,	6	6	100,00%	35.110.000	27.145.000	77,31%

		dan kemasyarakatan yang tersusun						
2	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran perda, dan perkada yang difasilitasi	3	1	33,33%	1.080.000	1.080.000	100,00%
IV	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan dengan baik	100	100	100,00%	48.394.224	30.690.000	63,42%
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara K	a. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan	2	2	100,00%	48.394.224	30.690.000	63,42%
		b. Jumlah Lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Besar Nasional	1	1	100,00%			
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100	100	100,00%	10.576.100	7.514.000	71,05%
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran	15	15	100,00%	10.576.100	7.514.000	71,05%

	Pengawasan Pemerintahan Desa	dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu						
Total						**5.095.490.746**	**4.294.636.187**	

3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

1. Efektivitas dan efisiensi Tahun 2022.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi	139,86%	70,70%	69,16%%
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	a. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	104,27%	68,78%	23,60%
	b. Nilai SAKIP	101,82%		
	c. Nilai RB	83,76%		
	d. Nilai IPP	78,67%		
	e. Serapan Anggaran	93,38%		

Tabel 23 Efektivitas dan Efisiensi Tahun 2022

2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

SASARAN 1 : Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat indikator kinerja yang efektif tercapai 139,86%, dan penyerapan anggaran sebesar 70,70% sehingga didapatkan efisien sebesar 69,16% .

Efisiensi tersebut disebabkan oleh : Indikator kinerja yang baru sehingga target pada sasaran 1 yaitu sebesar 71,5% sedangkan realisasi yang telah dicapai adalah 100%. Selain itu juga disebabkan karena adanya efisiensi atau penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung indicator tersebut tanpa mengurangi nilai manfaat atau tujuan dari kegiatan tersebut.

SASARAN 2 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

Berdasarkan pengukuran efektivitas dan efisiensi tersebut, dapat disampaikan bahwa terdapat indikator kinerja yang efektif tercapai

dengan rata-rata 92,38%, dan penyerapan anggaran rata-rata sebesar 68,78% sehingga didapatkan efisien sebesar 23,60% .

Efisiensi tersebut disebabkan oleh : adanya efisiensi atau penghematan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang mendukung indicator tersebut tanpa mengurangi nilai manfaat atau tujuan dari kegiatan tersebut.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan, anggaran dan indikator yang diamanahkan Bupati Sidoarjo, sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Jabon telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja seluruh rangkaian indikator, program dan kegiatan baik dari aspek finansial maupun non finansial selama periode tahun 2022 secara komprehensif sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dan Bupati selaku pemberi amanah.

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2022 yaitu sasaran pertama Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan target 71,5% dan realisasi 100% sehingga memperoleh capaian sebesar 139,86% dengan kategori sangat berhasil. Sedangkan pada Sasaran kedua (tambahan) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan pada indicator Nilai Reformasi Birokrasi masih belum tercapai yakni hanya mencapai 22,8 dari yang ditargetkan sebesar 27,22, namun nilai tersebut mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu, pada indicator Nilai Indek Pelayanan Publik Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingka dengan tahun sebelumnya yakni dari 4,05 menjadi 3,54 dari yang ditargetkan sebesar 4,05. Dan yang terakhir pada indicator prosentase penyerapan anggaran hanya memperoleh sebesar 84,04% dari yang ditargetkan sebesar 90%, hal tersebut disebabkan oleh adanya evaluasi dan penghematan terhadap beberapa kegiatan.

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan instansi terkait dan instansi vertikal di wilayah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap jajaran dan instansi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada outcome, berbasis kinerja dan bertujuan melayani masyarakat

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Melakukan review terhadap target yang telah ditetapkan sebelumnya, agar capaian yang telah dihasilkan pada Tahun 2022 dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penetapan perjanjian kinerja Tahun 2023;
2. Mendorong pelaksanaan program kerja sesuai dengan rencana kinerja dan penganggaran, termasuk rencana aksi yang telah ditetapkan;
3. Mendorong koordinasi yang lebih intensif dengan melaksanakan Rapat Koordinasi rutin setiap bulan dengan jajaran Forkopimcam dan instansi terkait guna menyampaikan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Jabon dan bersama menemukan solusi guna menangani permasalahan sosial kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Jabon;
4. Terus melakukan monitoring dan evaluasi atas program yang berjalan, agar program dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan target yang diharapkan;
5. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan publik agar dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi terkini. Digitalisasi layanan tersebut berdampak pada penyederhanaan bisnis proses dan SOP sehingga lebih mengurangi interaksi tatap muka dengan masyarakat.

Lampiran

1. Perjanjian Kinerja
   https://drive.google.com/file/d/1kZDZ1HdmcB0upsr6VDJGJ-V9fufk7yTp/view?usp=share_link
2. Indikator Kinerja Utama
   https://drive.google.com/file/d/1SChtSTeADNju3nfmVCVKW4lPIExzFnR4/view?usp=share_link
3. Rencana Aksi
   https://drive.google.com/file/d/1Suaca_RKepTGyhYWv1sroHWzG4aKvz8S/view?usp=sharing
4. Pohon Kinerja
   https://drive.google.com/file/d/1SPRHjczSer14EUCRNi3abMwhckaeqEJg/view?usp=sharing